PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran
Volume 06 Nomor 02 Oktober 2022
e-ISSN: 2549-9114 dan p-ISSN: 2549-9203
(Received: Maret 2022; **Reviewed:** September 2022; **Published:** Oktober-2022)
DOI: https://doi.org/10.26858/pembelajar.v6i2.38354

Kepala Sekolah Memberdayakan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di SD Negeri Bawakaraeng 1 Makassar

Alphian Sahruddin[a]

Universitas Negeri Makassar

Corresponding e-mail: phianshof86@gmail.com

Abstrak: Hadirnya layanan pendidikan yang berkualitas di sekolah merupakan sebuah keharusan, oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat perlu diberdayakan untuk ikut serta. Kesadaran dan keinginan masyarakat untuk terlibat mengambil tanggung jawab pendidikan bukanlah sekadar harapan melainkan sebuah tuntutan mendesak yang segera dapat diwujudkan pada masing-masing satuan pendidikan. Bentuk partisipasi itu telah banyak dilakukan dalam skala kecil maupun besar yang terimplementasi dalam berbagai bentuk dan ekspresi sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Beberapa strategi yang dilakukan di SD Negeri Bawakaraeng I Makassar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan diantaranya, 1) menjalin komunikasi yang intens dengan orangtua murid melalui Komite Sekolah maupun organisasi Paguyuban Kelas. Hal ini bertujuan untuk mencari orang-orang yang mempunyai komitmen dan perhatian khusus terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. 2) Pelibatan orangtua dan masyarakat dalam berbagai kegiatan atau program sekolah. Pembentukan paguyuban kelas, komite sekolah, majelis ta'lim merupakan cara untuk melibatkan orangtua dan masyarakat dalam berbagai program sekolah. 3) Memaksimalkan dukungan dari komite sekolah. Komite sekolah dapat berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dengan dunia usaha, komunitas Alumni dan stakeholder lainnya yang dapat membantu kemajuan sekolah.

Kata Kunci: Strategi Kepala Sekolah, Partisipasi Masyarakat, Penyelenggaraan Pendidikan

Abstract: The presence of quality education services in schools is a must, therefore all stakeholders including the community need to be empowered to participate. The awareness and desire of the community to be involved in taking responsibility for education is not just a hope but an urgent demand that can immediately be realized in each educational unit. This form of participation has been carried out on a small or large scale which is implemented in various forms and expressions according to the conditions of each school. Some of the strategies implemented at SD Negeri Bawakaraeng I Makassar to increase community participation in the implementation of education include, 1) establishing intense communication with parents of students through the School Committee and the Class Association organization. It aims to find people who have a commitment and special attention to the development and progress of the school. 2) Involvement of parents and the community in various school activities or programs. The formation of class associations, school committees, ta'lim assemblies is a way to involve parents and the community in various school programs. 3) Maximizing support from school committees. The school committee can function as a liaison between the school and the business world, the Alumni community and other stakeholders who can help the school progress.

Keywords: *Principal Strategy, Community Participation, Education Implementation*

©2022 –Pembelajar Universitas Negeri Makassar. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1 PENDAHULUAN

Pendidikan dipandang sebagai bagian terpenting dalam membangun dan memajukan peradaban sebuah bangsa. Akibatnya berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan untuk mewujudkan proses pendidikan yang bermutu. Fakta menunjukkan berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah belum juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap layanan pendidikan di satuan pendidikan.

Menurut survey *Political and Economic Risk Consultant* (PERC) terlihat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 12 negara Asia yang di survey. Posisi Indonesia masih berada dibawah Vietnam. Selanjutnya, menurut data yang dilaporkan oleh *The World Economic Forum* Swedia pada tahun 2000 sumber daya manusia Indonesia memiliki daya saing yang rendah yaitu berada pada posisi ke 37 dari 54 negara dunia yang di survey. Begitu juga laporan dari *United Nation Development Program* (UNDP) pada tahun 2005 terungkap bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menempati posisi ke 110 dari 117 negara di dunia. (Khaliqa 2017:16).

Budimansyah (2008:56) menyatakan bahwa berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya melalui pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, pengadaan buku dan alat peraga pembelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu pengelolaan manajemen sekolah. Berbagai indikator mutu pendidikan masih belum menunjukkan adanya peningkatan mutu yang signifikan (Depdiknas, 2005).

Masalah di atas terjadi disebabkan oleh berbagai faktor pemicu. (Tanoto Foundation, 2018) menjelaskan bahwa faktor pemicu tersebut disebabkan oleh 1) kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang masih sangat berorientasi pada hasil; 2) penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara sentralistik; dan 3) kurangnya keterlibatan peran serta masyarakat terkhusus orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Pemerintah melalui Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah mengupayakan penyelenggaraan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam pasal 51 (1) dikatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (Peraturan Pemerintah, 2003:26). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah proses mengelola sumber daya yang ada di sekolah secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung kepada semua komponen warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, orangtua dan masyarakat.

Pada pasal 54 ayat (1) dikatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (Peraturan Pemerintah, 2003:27). Dimana sebelumnya pada pasal 8 telah dikatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Juga pada pasal 9 dikatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah, 2003:27).

Mas (2011:184) berpendapat bahwa penerapan model MBS ini dilandasi beberapa asumsi diantaranya, 1) sistim sentralisasi pendidikan yang diterapkan selama ini belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan; 2) kebijakan pendidikan selama ini lebih berfokus pada *input* dan *output*, padahal sekolah sebagai sebuah sistem hendaknya fokus pada *input*, *proses*, dan *output*; 3) model MBS dianggap tepat dan sesuai dengan jiwa otonomi daerah yang sedang diterapkan saat ini; dan 4)

memberikan kesempatan dan peluang kepada sekolah dan berbagai *stakeholder* dalam berinovasi mengembangkan sekolah sesuai dengan kondisi dan potensi sekolahnya masing-masing.

Kesadaran dan keinginan masyarakat untuk terlibat mengambil tanggung jawab pendidikan bukanlah sekadar harapan melainkan sebuah tuntutan mendesak yang segera dapat diwujudkan pada masing-masing satuan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, bukanlah hal yang baru. Bentuk partisipasi itu telah banyak dilakukan dalam skala kecil maupun besar yang terimplementasi dalam berbagai bentuk dan ekspresi sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing.

Bentuk partisipasi masyarakat ini cenderung bersifat dinamis. Conyears (Khaliqa 2017:17) mengidentifikasikan tiga kebutuhan dasar dalam pembangunan masyarakat, salah satunya adalah partisipasi dalam membuat dan melaksanakan program, selain kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, dan papan, selanjutnya pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat, sudah menjadi ketentuan dan tanggungjawab penyelenggara dan pengelolaan pendidikan yakni pemerintah dan sekolah. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan harus terus berupaya memelihara (maintenance) partisipasi masyarakat dengan menerapkan berbagai konsep manajemen yang terbaik. Melalui berbagai program-program sekolah yang mampu menarik simpati dan perhatian masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi aktif memajukan kualitas layanan pendidikan yang menjawab tuntutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

Fauziyati (2018:158) menyampaikan bahwa berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Siswa akan berkembang secara maksimal baik di bidang akademik maupun non akademik. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan konsep pendidikan Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemdikbudristek yang menjadikan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah harus berorientasi kepada siswa atau peserta didik. Semua itu tentu sangat relevan dengan tugas dan fungsi kepala sekolah dan peran serta masyarakat untuk saling bersinergi untuk terus membantu dan mendukung proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah demi perkembangan peserta didik, yang tentu akan bermuara pada pencapaian mutu pendidikan di sekolah.

Eccles & Harold (1993:568) berpendapat bahwa terdapat berbagai manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan akan menunjukkan bahwa tolak ukur paling akurat atas apa yang didapatkan oleh siswa di sekolah bukanlah berupa pendapatan atau status sosial, namun lebih dari itu yang masyarakat akan mampu, 1) menciptakan sebuah suasana yang nyaman sehingga mendorong lahirnya sebuah pembelajaran yang berkualitas baik; 2) menunjukkan harapan yang tinggi akan sesuatu yang nantinya akan diperoleh oleh anak-anak mereka dan harapan yang tinggi akan pekerjaan anak-anaknya di masa depan; 3) terlibat dalam proses pendidikan anak mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat.

SD Negeri Bawakaraeng 1 Makassar adalah salah satu sekolah dasar yang berada di ruas jalan protokol Jl. Gunung Bawakaraeng No. 150 Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar. Sekolah dasar ini berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekolah ini didirikan berdasarkan **Surat Keputusan Kemendikbud Nomor 20.01.03.12.4.20003 pada tanggal 17 Agustus 1969**. Akreditasi sekolah adalah B dengan nomor SK Akreditasi 079/SK/BAP-SM/X/2018 tertanggal 7 Oktober 2018. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini menyebabkan sekolah yang berada di pusat kota Makassar ini mengalami berbagai kemunduran.

Berdasarkan paparan masalah di atas, maka perlu sebuah langkah strategis yang harus dilakukan oleh kepala sekolah selaku pemimpin manajerial sekolah untuk memberdayakan berbagai partisipasi masyarakat untuk terlibat

dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri Bawakaraeng 1 Makassar.

2 STRATEGI KEPALA SEKOLAH

Banun, Yusrizal & Usman (2016:139) berpendapat bahwa strategi adalah kerangka yang membimbing dan mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan dan arah suatu organisasi. (Sumantri & Permana (1998:40) menjelaskan bahwa kata strategi berasal dari kata *strategos* (Yunani) atau *strategus*. *Strategos* berarti jenderal atau berarti pula perwira Negara (*states officer*). Jenderal inilah yang memiliki tanggungjawab membuat perencanaan dan strategi untuk mengarahkan pasukan atau personilnya untuk mencapai kesuksesan atau kemenangan.

Wena (2014:2) berpendapat bahwa strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam peperangan digunakan strategi peperangan dengan menggunakan sumber daya tentara dan peralatan perang untuk memenangi peperangan. Dalam bisnis digunakan strategi bisnis dengan mengerahkan sumber daya yang ada sehingga tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan tercapai. Dalam pembelajaran digunakan strategi pembelajaran dengan penggunaan berbagai sumber daya (guru dan media) untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah digunakan strategi pengelolaan pendidikan dengan penggunaan berbagai sumber daya pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.

Mansyur (1996:1) menjelaskan bahwa strategi dapat dimaknai sebagai sebuah garis-garis besar haluan bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Newman & Logan Mansyur (1996:1) menyatakan bahwa strategi merupakan dasar dari setiap usaha yang meliputi empat hal pokok, diantaranya: 1) pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi tujuan yang harus dicapai dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya; 2) pertimbangan dan penetapan cara pendekatan utama yang dianggap ampuh untuk mencapai sasaran; 3) pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak titik awal pelaksanaan sampai titik akhir dimana sasaran telah tercapai; 4) pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku untuk digunakan dalam mengukur taraf keberhasilan usaha.

Wahyosumidjo (2010) berpendapat bahwa kepala sekolah merupakan gabungan dari dua kata yaitu "kepala" yang berarti pemimpin dan "sekolah" yang berarti lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberikan pelajaran. Mulyasa (2012) menyatakan bahwa untuk dapat bersaing di zaman yang semakin maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan kemajuan teknologi informasi (IT) maka sangat diperlukan seorang kepala sekolah yang profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kepala sekolah merupakan pimpinan di suatu lembaga pendidikan yang tentu perlu memiliki serangkaian strategi untuk dapat kualitas layanan pendidikan di sekolah melalui pengembangan motivasi guru dan tenaga kependidikan juga mendorong pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Wahyosumidjo (2010 :82) menyatakan bahwa kepala sekolah adalah seorang guru yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural di sekolah yang ditugaskan untuk mengelola sekolah. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Lazwardi (2020:141) mengatakan bahwa kepala sekolah memegang peranan penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan personil sekolah yang ada, agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah.

Peran kepala sekolah sebagai seorang pemimpin menggambarkan tanggungjawab kepala sekolah sebagai penggerak sumber daya yang ada di sekolah yang meliputi guru, siswa, komite sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar. Wahyosumidjo (2010 :90) menjelaskan fungsi kepemimpinan kepala sekolah amat penting sebab disamping bertugas sebagai penggerak juga berperan sebagai kontrol segala aktivitas guru (dalam rangka peningkatan keprofesionalan berkelanjutan) staff, siswa, komite sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar sekaligus untuk meneliti berbagai persoalan yang timbul di lingkungan sekolah untuk dapat segera diselesaikan dan dicarikan solusi.

Kepala sekolah memiliki tugas-tugas yang sangat strategis sebagai langkah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Herabudin (Fauziyati (2018:165-166) menyebutkan beberapa tugas dari seorang kepala sekolah sebagai berikut:

a. Membuat Perencanaan
   Perencanaan ini berkaitan dengan program pengajaran, kesiswaan, membina guru, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan pengembangan aktivitas siswa yang bersifat intra kurikuler dan ekstra

kurikuler. Tanpa perencanaan atau planning pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan mungkin juga kegagalan. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah harus membuat rencana tahunan.

b. Pengembangan dan pemberdayaan kepegawaian
   Dalam memberi atau membagi tugas pekerjaan personil, kepala sekolah hendaknya memperhatikan kesesuaian antara beban dan jenis tugas dengan kondisi serta kemampuan pelaksanaannya.
c. Pengelolaan administrasi sekolah
   Mencakup pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan, baik uang berasal dari pemerintah ataupun sumber lainnya.
d. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah/madrasah
   Pengembangan sarana sekolah meliputi perbaikan atau rehabilitas gedung sekolah, penambahan ruang kelas, perbaikan atau pembuatan lapangan olahraga, perbaikan atau pengadaan bangku murid atau sebagainya.

3 PARTISIPASI MASYARAKAT

Menurut Wasir dkk. (Normina, 2016:72) partisipasi dapat diartikan keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, seseorang dapat dikatakan melakukan partisipasi jika telah melakukan kegiatan berbagai dengan orang atau kelompok lain baik dalam bentuk nilai, tradisi, kesetiaan, perasaan, tanggungjawab maupun kepatuhan bersama.

Beberapa unsur penting yang tercakup dalam pengertian partisipasi seperti yang diungkapkan oleh Suryosubroto (2001:75) diantaranya: 1) dalam partisipasi yang ditelaah bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juga pikiran dan perasaan (mental dan emosional); 2) partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi orang-orang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga daya kemampuan pikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan-tujuan kelompok; dan 3) dalam partisipasi mengandung pengertian orang untuk ikut serta dan bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Ketiga hal tersebut menandakan bahwa semakin tinggi rasa keterlibatan psikologis individu denga tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka akan semakin tinggi pula rasa tanggungjawab seseorang untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin.

Mikkelsen (Normina, 2016:72) membagi partisipasi menjadi enam pengertian, yaitu:

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
b. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Adi (2008) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut Normina (2016:73-74) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

a. Partisipasi Finansial
   Partisipasi dalam bentuk dukungan dana sesuai dengan kemampuan masyarakat. Orangtua dapat secara kolektif mendukung dana yang diperlukan oleh sekolah dan benar-benar dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan proses penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, dunia usaha dan industri maupun bisnis juga diharapkan dapat memberikan bantuan dalam bentuk anggaran pengadaan sarana dan prasarana sekolah maupun beasiswa pendidikan kepada siswa.

b. Partisipasi Material
   Partisipasi ini dalam bentuk sumbangan bahan-bahan yang terkait dengan material bangunan, untuk perbaikan atau penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar mengajar sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
c. Partisipasi Akademik
   Partisipasi ini dalam bentuk dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu, sangat banyak lembaga di luar sekolah baik formal maupun non formal yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktik maupun magang.
d. Partisipasi Kultural
   Perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga mampu melakukan penyesuaian diri dengan kondisi kultur dan budaya masyarakat setempat.
e. Partisipasi Evaluative
   Partisipasi ini berbentuk keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol atau pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Disamping itu, masyarakat juga dapat secara aktif berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah. Tujuannya agar kurikulum yang dibuat tetap sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan siswa.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan nasional dapat dirujuk dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Peraturan Pemerintah, 2003:28-29) pada pasal 56 terkait pembentukan dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah yang secara rinci dijelaskan pada ayat 1 sampai dengan 4 sebagai berikut:

a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
c. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
d. Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas, Karsidi (2005:115-116) berkesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan sebagai berikut:

a. Terdapat opini dalam masyarakat bahwa tanggungjawab utama pembangunan (dalam bidang pendidikan) semata terletak di tangan pemerintah sehingga menyebabkan masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek buka pelaku utama. Hal ini akhirnya melemahkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kondisi ini tentu sangat merugikan dunia pendidikan dan tentu sangat memberatkan pemerintah dan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
b. Berkembangnya teknologi dan informasi menyebabkan beberapa peran sekolah dalam proses pendidikan dan pembelajaran perlahan mulai bergeser. Proses pembelajaran tidak lagi harus berlangsung dalam ruang kelas melainkan dapat berlangsung dalam ruang virtual yang tidak terbatas ruang dan waktu. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Sehingga peran masyarakat dan orangtua menjadi sangat penting untuk terlibat membantu dan mendampingi anak saat belajar di rumah.
c. Otonomi daerah telah menggeser paradigma pembangunan sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini akhirnya membuka peluang bagi kembalinya peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan.
d. Masyarakat terlebih lagi orangtua siswa wajib untuk dilibatkan dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan, pemanfaatan, maupun evaluasinya.

e. Terdapat berbagai forum dan media untuk penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk turut membantu proses pengembangan penyelenggaraan pendidikan seperti forum musyawarah dan pembentukan organisasi atau lembaga masyarakat yang mampu menampung aspirasi masyarakat utamanya di wilayah atau komunitas dimana sekolah/lembaga pendidikan itu berada.
f. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme partisipasi masyarakat terhadap pengembangan penyelenggaraan pendidikan baik dalam skala nasional, daerah maupun di tingkat satuan pendidikan.

4 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan berasal dari kata dasar "selenggara" yang berarti mengatur. Adapun pengertian penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses melakukan kegiatan tertentu (KBBI, 2022). Penyelenggaraan juga dapat diartikan sebagai pengorganisasian yang berasal dari kata dasar "organisasi". Handoko (2001) berpendapat bahwa organisasi mempunyai dua pengertian yang umum diketahui oleh orang banyak yaitu, 1) menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu perkumpulan olahraga; dan 2) berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam manajemen kegiatan organisasi yang dialokasikan dan ditugaskan antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Menurut Hasibuan (2004) penyelenggaraan merupakan suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya Handoko (2001) menjelaskan bahwa penyelenggaraan merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Viardha (2016) menyatakan bahwa, agar penyelenggaraan dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya maka perlu adanya bentuk-bentuk penyelenggaraan, sebagai berikut:

a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi;
b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi;
c. Sumber daya manusia yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal;
d. Sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi;
e. Sarana dan prasarana yang dimiliki yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Viardha (2016) melanjutkan bahwa ada empat tahap yang dilakukan ketika melakukan penyelenggaraan sebuah kegiatan. Pertama, menyusun kembali kerangka tujuan organisasi dengan menetapkan visi dan misi sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (Analisis SWOT). Kedua, menata ulang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi. Ketiga, memperbaiki iklim, mekanisme serta budaya organisasi agar sesuai dengan visi dan misi yang baru. Keempat, memperbaharui orang, baik dalam arti fisik berupa pergantian orang atau memperbaharui cara pandang dan semangatnya.

Berakar dari bahasa Latin "*educare*", pendidikan (*education*) dapat dipahami sebagai proses pembimbingan berkelanjutan (*to lead forth*). Oleh karena itu, proses pembimbingan tersebut pasti berdinamika ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan dipahami sebagai suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah mereka yang lebih matang dalam pengalaman, pemikiran, dan pengetahuan. Peserta didik berada pada posisi sebagai pihak kurang atau belum matang dalam pengalaman, pemikiran, dan pengetahuan. Meskipun berbeda keduanya saling terikat dengan sebuah "Kontrak Sosial Budaya" dengan satu kepentingan memajukan pendidikan melalui proses di lembaga pendidikan formal, informal, maupun non formal.

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab I Ketentuan Umum pada pasal (1) ayat (1)

dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Peraturan Pemerintah, 2003).

Pendidikan menurut Rivai & Murni (2012:58) adalah proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan (*knowledge acquisition*), mengembangkan kemampuan/ keterampilan (*skills developments*), sikap atau mengubah sikap (*attitude of change*). Pendidikan adalah suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya. Sebagai bagian dari masyarakat, pendidikan memiliki fungsi ganda (Suhartono, 2015), yaitu fungsi sosial dan fungsi individual. Fungsi sosialnya untuk membantu setiap individu menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif dengan memberikan pengalaman kolektif masa lalu dan sekarang. Fungsi individual pendidikan memungkinkan seseorang menempuh hidup yang lebih memuaskan dan lebih produktif dengan menyiapkan nya untuk menghadapi masa depan (pengalaman baru). Kedua fungsi tersebut dapat dilakukan secara formal seperti yang dilakukan di berbagai lembaga pendidikan (sekolah, pesantren, kampus), maupun non formal melalui berbagai kontak dengan media informasi seperti buku, surat kabar, majalah, TV, radio, dan sebagainya.

Langevell (Usman, 2019) seorang ahli pendidikan terkenal menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah upaya untuk memanusiakan manusia. Bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara (1977) menyatakan bahwa pendidikan yaitu terutama di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual), dan tubuh anak (raga).

Penyelenggaran pendidikan di Indonesia merupakan sebuah sistim pendidikan yang diatur sistimatis secara nasional. Pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab II pasal (2) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal (3) Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Peraturan Pemerintah, 2003).

Selanjutnya pada Bab III pasal (4) tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan disebutkan bahwa penyelenggaran pendidikan Indonesia menganut 6 prinsip (Peraturan Pemerintah, 2003:6) yang meliputi:

a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistim terbuka dan multimakna.
c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga masyarakat.
f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

5 STRATEGI KEPALA SEKOLAH MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus terlaksana dengan memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Perencanaan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan lembaga pendidikan maupun masyarakat. Selanjutnya perencanaan dibuat harus benar-benar memperhatikan tingkat kebutuhan mereka, sehingga sangat perlu keterlibatan kedua pihak dalam proses ini. Seluruh potensi baik itu berupa kekuatan,

tantangan, peluang, dan hambatan akan ditelaah dengan baik sehingga akan melahirkan program-program penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang baik dan bermutu tinggi. Program yang dibuat tentu akan sangat bermanfaat menunjang proses pendidikan di sekolah, misalnya yang terkait dengan pengembangan nilai-nilai karakter spiritual maupun sosial, ilmu pengetahuan, tumbuhnya kreativitas. Begitu pula tingkat kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari harapan mereka memilih sekolah menjadi tempat pendidikan bagi anaknya baik itu karena alasan teologis, akademik, sosiologi, filosofi, karir, maupun ekonomi.

Banyaknya kebutuhan yang di respon oleh sekolah dan masyarakat sebagaimana yang telah tertuang dalam perencanaan program sekolah menuntut timbulnya sebuah pelayanan maksimal (pelayanan prima). Sekolah dan masyarakat harus bergerak bersama melalui sebuah wadah yang dikenal sebagai komite sekolah yang akan bertugas melaksanakan seluruh program serta berinovasi sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan atau implementasi maka perlu berbagai cara atau strategi yang cermat, teliti, dan juga serius dari semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat tercermin dari Kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah dan masyarakat umum lainnya. Kepala sekolah, guru, dan staf akan bekerja memastikan semua program sekolah terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan. Komite sekolah dan masyarakat mengambil peran untuk mendukung dan mem back up seluruh kegiatan itu terlaksana.

Komite sekolah sebagai mitra kerja sekolah, akan ikut berpartisipasi menghimpun segala sumber daya yang mendukung suksesnya program sekolah. Mengajak sebanyak mungkin masyarakat, LSM, maupun instansi pemerintah maupun non pemerintah begitu pula dunia usaha, perguruan tinggi dan akademisi untuk terlibat dan membantu sumber daya manusia, sumber dana maupun peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan.

Pada tahap pemantauan (monitoring) dilaksanakan bersamaan saat pelaksanaan berlangsung. Monitoring dilakukan untuk melihat tingkat keterlaksanaan program sesuai dengan apa yang telah terencana.

Pada tahap evaluasi dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap ketercapaian program yang telah terlaksana. Evaluasi dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program. Hal baik dalam pelaksanaan program agar terus ditingkatkan pada program selanjutnya. Segala kekurangan akan menjadi pertimbangan untuk segera diperbaiki agar pelaksanaan berikutnya dapat lebih baik lagi.

Beberapa strategi yang dilakukan di SD Negeri Bawakaraeng I Makassar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan diantaranya:

a. Menjalin komunikasi yang intens dengan orangtua murid melalui Komite Sekolah maupun organisasi Paguyuban Kelas. Hal ini bertujuan untuk mencari orang-orang yang mempunyai komitmen dan perhatian khusus terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Hal yang dilakukan adalah mencari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengajak dan mempengaruhi orangtua dan masyarakat untuk ikut serta mendukung program-program yang ada di sekolah.
b. Pelibatan orangtua dan masyarakat dalam berbagai kegiatan atau program sekolah. Hal ini dilakukan agar orangtua maupun masyarakat merasa diberikan kesempatan untuk turut andil memajukan sekolah. Pembentukan paguyuban kelas, komite sekolah, majelis ta'lim merupakan cara untuk melibatkan orangtua dan masyarakat dalam berbagai program sekolah.
c. Memaksimalkan dukungan dari komite sekolah. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi percepatan pengembangan sekolah. Komite sekolah sebagai mitra sekolah adalah pihak yang akan sangat mendukung kinerja sekolah jika mereka merasa diberi ruang untuk berpartisipasi. Komite sekolah dapat berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dengan dunia usaha, komunitas Alumni dan stakeholder lainnya yang dapat membantu kemajuan sekolah.

6 KESIMPULAN

Kepala sebagai tenaga profesional yang bertugas memimpin manajemen dan kemajuan sekolah. Kepala sekolah mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak termasuk orangtua maupun masyarakat. Tujuannya agar kemajuan sekolah dapat berlangsung progresif dan terukur. Sehingga seorang kepala sekolah haruslah mampu memiliki strategi yang tepat untuk melibatkan orangtua siswa dan

masyarakat untuk bersama-sama bertanggung jawab memajukan kualitas pendidikan di sekolah. Begitupun di SD Negeri Bawakaraeng I Makassar pelibatan orangtua siswa dan masyarakat dilakukan dengan strategi menggalang dukungan dengan cara mengikutsertakan orangtua siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program yang ada di sekolah. Selain itu, melakukan identifikasi berbagai kekuatan yang dapat orangtua siswa dan masyarakat berikan kepada sekolah untuk mendukung semua program sekolah yang telah dibuat.

7 DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan masyarakat Sebagai upaya Pemberdayaan masyarakat*. PT Raja Grafindo Persada. http://lib.fkip.unsyiah.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=403

Banun, Sri., Yusrizal, & Usman, N. (2016). Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SMP Negeri 2 Unggul Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 (1)*, 137–147. https://media.neliti.com/media/publications/74225-ID-strategi-kepala-sekolah-dalam-meningkatk.pdf

Depdiknas. (2005). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Direktorat PLP.

Dewantara, K. H. (1977). *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan* (Cet.2). Majelis Luhur Pendidikan Taman Siswa.

Eccles, Jacquelynne S. & Harold, R. D. (1993). *Parent-School Involment During The Early adolescent Years*. Teacher College Record.

Fauziyati, W. R. (2018). Strategi Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan menuju Generasi Maju Indonesia. *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, Vol. 10(1)*, 157–177. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/140

Handoko, T. H. (2001). *Manajemen*. BPFE.

Hasibuan, L. (2004). *Melejit Mutu Pendidikan*. Sapa Project.

Karsidi, R. (2005). *Sosiologi Pendidikan*. UNS Press.

KBBI. (2022). *KBBI Daring*. Kbbi.Kemdikbud.Do.Id. kbbi.kemdikbud.go.id

Khaliqa, A. (2017). Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqon Banjarmasin. *JURNAL TRANSFORMATIF (Islamic Studies), Vol. 1(1)*, 16–31. https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/666/735

Lazwardi, D. (2020). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Universitas Nahdlatul Ulama Lampung*, 139–157. https://media.neliti.com/media/publications/57188-ID-peran-kepala-sekolah-dalam-meningkatkan.pdf

Mansyur, H. (1996). *Strategi Belajar Mengajar*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka.

Mas, S. R. (2011). Partisipasi Masyarakat dan Orangtua dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal El-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Malang, Vol. 8(2)*, 184–196. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/2243/pdf

Mulyasa, E. (2012). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.

Normina. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Vol. 14(26*, 71–85. https://core.ac.uk/download/pdf/327228224.pdf

Peraturan Pemerintah. (2003). *Undang-undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Pemerintah Pusat. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003

Permendiknas. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah*. Kementerian Pendidikan Nasional.

Rivai, V., & Murni, S. (2012). *Education Management* (Cet. 3). Rajawali Pers.

Riyanto, Y. (2010). *Paradigma Baru Pembelajaran (Sebagai Referensi bagi Pendidik dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas*. Kencana Prenada Media Group.

Suhartono, S. (2015). *Filsafat Administrasi Pendidikan (Sebagai Jalan Lurus Menuju Tujuan Pendidikan)* (Cet. I). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

Sumantri, Mulyani., & Permana, J. (1998). *Strategi Belajar Mengajar*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1121

Suryosubroto. (2001). *Humas Dalam Dunia Pendidikan*. Mitra Gama Media.

Tanoto Foundation. (2018). *Peran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Tanotofoundation.Org. https://www.tanotofoundation.org/id/blog/peran-manajemen-berbasis-sekolah-mbs-dalam-peningkatan-mutu-pendidikan/#:~:text=Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah,siswa%2C orang tua dan masyarakat.

Usman, H. (2019). *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)* (Suryani (ed.); Cet. IV). Bumi Aksara.

Viardha, S. (2016). *Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji dan Keagamaan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiayh Kota Semarang tahun 2016* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6491/

Wahyosumidjo. (2010). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik Dan Permasalahannya*. RajaGrafindo Persada.

Wena, M. (2014). *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual Operasional* (F. Yustianti (ed.); Edisi 1, C). Bumi Aksara.